



LEMHANNAS RI

NEWSLETTER

TIADA KEBENARAN YANG MENDUA

Edisi I 20 Agustus 2009

KURIKULUM BERBASIS 11 PRINSIP PEMBAHARUAN LEMHANNAS RI



Acara Pengalungan Medali dan Pemberian Tanda Penghargaan Wibawa Berprestasi Tinggi dan Predikat Andalan oleh Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, SH

Selama 44 tahun sejak berdirinya pada 20 Mei 1965, Lemhannas RI berhasil mendidik ribuan calon pemimpin tingkat Nasional baik sipil maupun militer yang kini tersebar diseluruh Indonesia, termasuk 80 peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XVI yang dibuka sejak 17 Pebruari 2009, terdiri dari 49 pejabat sipil, 29 Perwira Tinggi TNI dan 2 Perwira Tinggi Polri, dengan dua puluh orang diantaranya menjabat Profesor.

Ketika menutup PPSA XVI di Gedung Dwiwarna Purwa, 31 Juli 2009, Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, SH mengatakan, kurikulum yang diterapkan mengacu pada prinsip perubahan yang dilaksanakan di Lemhannas RI, meliputi :

1. Prinsip profesionalisme yang

mengandung nilai-nilai *Expertise, Responsibility and Corporateness*

2. Prinsip *Check and Balances* dengan menempatkan Dewan Pengarah sebagai perumus kebijakan umum (*General Policy Making Body*) Lemhannas RI.

3. Prinsip *Continuing Education* yang memungkinkan alumnus Lemhannas RI meneruskan studi Pasca Sarjana dibidang studi strategis.

4. Prinsip kebenaran dengan cara menegakkan *Intellectual Integrity, Academic Freedom and Academic Culture*

5. Prinsip *Quality Assurance* yakni menyejajarkan Lemhannas RI dengan lembaga sejenis diluar negeri.

6. Prinsip Efisiensi dan Efektivitas (mengembangkan *distance*

education) untuk materi inti Lemhannas RI

7. Prinsip Transparansi, dengan memanfaatkan semua sumber daya manusia (SDM) Nasional (*Outsourcing of National Human Resources*)

8. Prinsip Reformasi, menjadikan Lemhannas RI sebagai salah satu *Driving Forces* proses demokratisasi

9. Prinsip Sistemik, yang berorientasi pada perubahan struktural, substantif, dan kultural secara gradual.

10. Prinsip keseimbangan antar *Inward-Outward Looking*

11. Prinsip Adaptasi Teknologi dengan memanfaatkan teknologi telematika (telekomunikasi, multimedia dan komunikasi)

DAFTAR ISI

1 Kurikulum berbasis 11 Prinsip Pembaharuan.....	1
2 Demokrasi dan Keluarga.....	2
3 Kunjungan Tamu mancanegara.....	3
4 Pengkajian Strategis Lemhannas RI...	4
5 Pedoman Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan.....	4
6 Geo Leadership.....	5
7 Sarasehan Opini WTP Lemhannas RI.....	6
8 Penghargaan Pemerintah RI atas Predikat WTP kepada Lemhannas RI	6
9 SSDN dan SSLN PPSA XVI Lemhannas RI	7
10 KKL BEM FH Undip dan KKL IKIP Veteran Semarang.....	8

Demokrasi dan Keluarga



Gubernur Lemhannas RI, sedang mengalungkan tanda peserta penataran istri/suami peserta PPSA XVI.

Rumah tangga yang harmonis memberikan kontribusi strategis bagi terwujudnya kehidupan demokrasi sebagai suatu proses. Hal itu dikatakan Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, SH pada penataran istri/suami peserta PPSA XVI di Jakarta. Fondasi demokrasi, menurut Muladi, lahir dari proses pembelajaran me-manusiakan didalam kehidupan keluarga, bukan hanya karena proses politik. Dalam rumahtangga prinsip kesetaraan penting, sehingga semua *stakeholders* memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan proses kehidupan demokrasi yang sehat. Ada 3 prinsip utama yang perlu dipedomani dalam kehidupan keluarga yakni tidak ada diskriminasi, kebebasan berpendapat dan bertindak serta tidak ada kekerasan. Gubernur Lemhannas menekankan, dalam

Islam dikenal keluarga sakinah, yang merupakan manifestasi dari keluarga demokratis, tanpa membeda-bedakan anggota keluarga. Rumahtangga yang demokratis memberi ruang gerak yang luas bagi terwujudnya kebebasan berpendapat dan bertindak. Sebagai contoh, seorang

ayah yang demokratis tidak akan memaksakan kehendak baik kepada isteri maupun anaknya, sehingga tumbuh jalinan komunikasi yang sehat untuk bersama-sama mengambil keputusan. Kewibawaan orangtua dalam rumah tangga tidak selalu berawal dari sikap keras, karena tindakan kekerasan dalam rumahtangga bukanlah cermin kehidupan demokratis. Orangtua yang baik selalu memberi alternatif terbaik penyelesaian masalah pada anaknya, memberi contoh tauladan dan menjauhkan tindakan egois dan semena-mena. Makna demokrasi adalah kebebasan bukan tanpa batas, karena kebebasan tanpa batas adalah anarki. Anarkisme bertentangan dengan prinsip demokrasi karena demokrasi yang sehat sesungguhnya adalah sikap tulus ikhlas dan saling menghargai hak dan kewajiban orang lain. Untuk mewujudkan itu, diperlukan perundang-undangan dan penegakan hukum.



Refleksi keluarga yang demokratis.

Kunjungan anggota SEAS US PACOM tahun 2009 di Lemhannas RI



Para anggota SEAS US PACOM melaksanakan *Courtesy Call* di ruang Gubernur Lemhannas RI.

Dalam *Courtesy call* Mr. Michael Richards (*Public Diplomacy Advisor to the Commander US Pasific Command*) beserta tiga puluh dua anggota dari dua puluh Negara SEAS USPACOM's (*Symposium on East Asia Security US Pacific Command*) tanggal 18 April 2009 di terima oleh Gubernur Lemhannas RI didampingi Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI DR. Rio Mendung Thalieb dan Tenaga Ahli Pengajar Bidang Hubungan Internasional Lemhannas RI Marsda TNI Suryadarma, S.Ip. Pada kesempatan tersebut dilanjutkan diskusi di ruang Asta Gatra It III Barat dengan materi Pengenalan Profil Lemhannas RI, Ancaman Gangguan Tantangan dan Hambatan bagi Republik Indonesia, serta Pandangan Lemhannas RI

terhadap perkembangan Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Hankam dikawasan Asia Tenggara pada saat ini dan masa depan. Kunjungan diakhiri dengan saling tukar menukar cenderamata.

KUNJUNGAN THE AUSTRALIAN CHIEF OF DEFENCE FORCE, AIR CHIEF MARSHAL ANGUS HOUSTON AC, AFC

Pada tanggal 12 Januari 2009 *The Australian Chief of Defence Force, Air Chief Marshal Angus Houston AC, AFC* beserta empat orang anggota dari *Australian Defence College (The Defence and Strategic Studies Course)* melaksanakan kunjungan kehormatan ke Lemhannas RI. Para delegasi diterima oleh Gubernur Lemhannas RI Prof DR. Muladi, SH didampingi Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsekal Madya TNI. Dr. Rio Mendung Thalieb, Deputy Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Mayjen TNI I Putu Sastra Wingarta dan Tenaga Ahli Pengajar Bidang Internasional Marsda TNI Surya Dharma, S.Ip serta Karo Kerma Brigjen TNI Puspo Djoko Purwanto S.Ip dan Karo Humas Brigjen TNI Kusworo. Pada acara kunjungan tersebut dilakukan diskusi dan saling bertukar informasi serta pembicaraan tentang kemungkinan kerjasama antara Lemhannas RI dengan *Australian Defence College* khususnya dibidang pendidikan. Acara berlangsung penuh keakraban dan diakhiri dengan tukar menukar cenderamata.



Gubernur Lemhannas RI sedang berbincang dengan Air Chief Marshal Angus Houston AC, AFC beserta rombongan di ruang kerja.

PENGAJIAN STRATEGIS LEMHANNAS RI

Rabu, 22 Juli 2009 Lemhannas RI menyelenggarakan *Round Table Discussion* (RTD) Pengkajian Strategik tentang "Meningkatkan dukungan anggaran militer guna terwujudnya Pertahanan Negara yang kuat dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI". Dalam *Keynote Speech*nya, Gubernur Lemhannas RI antara lain menyampaikan bahwa dukungan Alutsista yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitasnya bagi TNI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat penting, mengingat ancaman militer semakin eskalatif sebagai akibat pengaruh lingkungan strategik. Dalam 5 tahun terakhir ini (2005-2009), dukungan anggaran militer melalui APBN belum memadai. Dari kebutuhan minimal bidang pertahanan yang diajukan Departemen Pertahanan hanya terealisasi sekitar 30% nya, yaitu sekitar 3,3% APBN atau kurang dari 1% PDB.

Dengan dukungan anggaran yang terbatas tersebut, penyelenggaraan fungsi pertahanan yang dilaksanakan TNI tentu tidak maksimal. Untuk itu harus dapat diwujudkan pertahanan negara yang kuat dalam rangka menjaga keutuhan wilayah NKRI, dan kedaulatan Bangsa serta Negara, dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategik dan kondisi geografis Indonesia yang rawan terhadap ancaman militer.

Beberapa *critical points* dari Gubernur Lemhannas RI untuk dapat dikembangkan dalam diskusi adalah :

- 1) Perlu adanya *Political Will* dan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara,
- 2) Meningkatkan kemampuan profesionalisme prajurit TNI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,
- 3) Melakukan penambahan Alutsista TNI sesuai dengan kondisi geografis Indonesia secara bertahap,
- 4) Meningkatkan dan/atau merealisasikan anggaran Pertahanan Negara, sedapat mungkin untuk memenuhi kebutuhan minimal dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara.



Wagub Lemhannas RI Marsdya TNI Dr. Rio Mendung Thalieb, M.Sc, PhD membuka RTD Pengkajian Strategik di ruang rapat Nusantara I.

PEDOMAN PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN



Para pejabat Lemhannas RI sedang memperhatikan pemaparan naskah akademik tentang Pedoman Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan di ruang Nusantara I Lemhannas RI.

Para pendiri bangsa (*The Founding Fathers*) telah berhasil mengangkat nilai-nilai yang terkandung di dalam khasanah kehidupan masyarakat Indonesia maupun ajaran para leluhur, sebagai nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Lemhannas RI selanjutnya merumuskan Pemantapan nilai-nilai kebangsaan berlandaskan pada pemikiran historis, landasan filosofis, landasan yuridis, landasan sosiologis, dan landasan teori. Sebagai konsepsi, nilai-nilai kebangsaan mengacu kepada konsensus dasar bangsa yang unsur-unsurnya terdiri dari :

- a. **Falsafah bangsa Pancasila.** Nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari falsafah Pancasila apabila ditelaah secara menyeluruh esensinya sebagai berikut :
 - Nilai Religius,** memiliki nilai-nilai spiritual yang tinggi berdasarkan agama dan keyakinan yang dipeluknya;
 - Nilai Kekeluargaan,** memiliki nilai-nilai kebersamaan dan senasib sepenanggungan;
 - Nilai Keselarasan,** memiliki kemampuan beradaptasi atau kearifan lokal;
 - Nilai Kerakyatan,** memiliki sifat keberpihakan kepada rakyat Indonesia dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah Negara. Secara keseluruhan, esensi nilai-nilai kebangsaan tersebut adalah: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, Sila Persatuan Indonesia, Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. **Konstitusi Negara UUD tahun 1945.** Di dalam pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 terkandung nilai-nilai : Kesadaran Hakiki, pengakuan akan kebenaran perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa dan Negara Indonesia, kesadaran rakyat sebagai manusia religius, serta kesadaran bahwa kemerdekaan yang diperjuangkan dengan sepenuh pengorbanan didasarkan pada keinginan luhur bukan atas kepentingan sesaat serta tujuan nasional dan tujuan bagi penyelenggaraan negara.
- c. **Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.** Nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah : Nilai Kesatuan Wilayah, Nilai Persatuan Bangsa, Nilai Kemandirian.
- d. **Semboyan Bangsa Bhineka Tunggal Eka.** Nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari semboyan Bhineka Tunggal Eka adalah : Nilai Toleransi, Nilai Keadilan, Nilai Gotong Royong/Kerjasama

Pada dasarnya pemantapan nilai-nilai kebangsaan tetap menjaga keseimbangan (*Balance*) antara moralitas Institusional (*Institution Morality*)/ Kelembagaan Negara, moralitas sosial (*Social Morality*) yang menyangkut kepentingan umum dan masyarakat, moralitas sipil (*Civil Morality*) serta moralitas global (*Global Morality*).

GEO LEADERSHIP SEBAGAI SIFAT PEMIMPIN MASA DEPAN

Pentingnya sosok pemimpin menurut Prof. DR. Muladi, SH, pada acara “Dialog Interaktif Leaders of Indonesiasatu”, tidak terlepas dari suatu sistem untuk menemukan informasi secara cepat, mudah, dan kategoris tentang standarisasi kualitas kepemimpinan yang relevan dengan konteks universal dan partikularistik. Atas dasar tersebut para pemimpin nasional di semua lini baik secara individual maupun kelompok diharapkan memiliki bekal yang kuat untuk mampu memecahkan kompleksitas permasalahan nasional, dengan cara-cara yang lebih profesional, elegan, dan bermartabat, dengan prinsip “*cheaper, faster and better*” tanpa melalui konflik-konflik yang melelahkan antar sesama komponen bangsa maupun pimpinan nasional. Perpaduan antara kemampuan konseptual dan empirik akan selalu meningkatkan bobot kinerja dan capaian (*performance and achievement*) seorang pemimpin, yang tidak hanya reaktif semata tetapi juga proaktif dan antisipatif.



Prof. DR. Muladi, SH menyampaikan pidato tentang Kepemimpinan di Manhattan Hotel-Jakarta, pada tanggal 11 Agustus 2009

“GeoLeadership” yang sifatnya Universal pada hakekatnya meliputi 4 (empat) kategori moralitas dan Akuntabilitas (rasa tanggung jawab), yaitu:

- a. Moralitas dan Akuntabilitas yang bersifat Sipil atau Individual;
- b. Moralitas dan Akuntabilitas yang bersifat Sosial Kemasyarakatan;
- c. Moralitas dan Akuntabilitas yang bersifat Institusional atau Kelembagaan; dan
- d. Moralitas dan Akuntabilitas yang bersifat Global/ Universal.

Nilai-nilai tersebut bersifat objektif-rasional dan menjauhi hal-hal yang berkonotasi subjektif-emosional dan primordialistik seperti dikotomi Tua-Muda, Jawa-Non Jawa, TNI-Non TNI, lama-baru dan sebagainya yang jauh dari semangat “*Indonesian Incorporated*”

yang merupakan refleksi dari sesanti Bhinneka Tunggal Ika yang sangat menjunjung tinggi pluralisme yang konstruktif dengan selalu berusaha untuk mendayagunakan semua *resources* nasional.

Karakter-karakter yang bersifat umum (*General Characteristics*) dan karakter yang bersifat khas (*Unique, Particularistic or Specific Characteristics*) atau karakteristik “*Geo Leadership*” merupakan kekhasan karakter kepemimpinan Indonesia dengan mempertimbangkan elemen-elemen geografis dan semangat lintas kultural yang konstruktif dalam masyarakat yang bersifat multikultural yang mampu menerapkan prinsip “*leading others across geographies and cultures*”.

Salah satu mekanisme mendapatkan pemimpin adalah melalui pesta demokrasi dalam bentuk Pemilu Legislatif dan Pilpres 2009 yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) dan jujur dan adil (jurdil), yang secara universal merupakan salah satu “*core values*” demokrasi, akan memilih para pemimpin di lingkungan lembaga legislatif (DPR, DPD, dan DPRD Provinsi Kabupaten/ Kota), dan Kepala Negara.

Pada kenyataannya yang diharapkan oleh bangsa Indonesia di era globalisasi saat ini dan di masa datang adalah tidak hanya pemimpin yang kuat yang memiliki perpaduan karakter sebagai manajer, *leader* (pemimpin) dan *statesman* (negarawan) dengan standar universal, tetapi juga memiliki kesetiaan terhadap nilai-nilai partikularistik berupa wawasan kebangsaan yang tidak diragukan.

SARASEHAN OPINI WTP LEMHANNAS RI

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil selalu berupaya menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat. *Output* berwujud sarana barang dan jasa, *outcome* adalah sarana, barang, dan jasa tersebut berfungsi dan bermanfaat bagi masyarakat. Kedepan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja. Salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah mengacu pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No : PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mempertahankan predikat opini tersebut atas laporan keuangan tahun-tahun mendatang perlu hendaknya selalu memperbaiki sistem pengendalian manajemen dengan memperlihatkan kondisi internal dan eksternal yang selalu berubah.

Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) merupakan opini tertinggi yang diberikan pemerintah melalui pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas laporan keuangan yang lengkap.

BPK dapat menerapkan seluruh prosedur pemeriksaan, dan laporan keuangan disajikan sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) untuk semua hal yang bersifat material. Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu pos atau bagian yang cukup kompleks karena dalam melakukan pengadaan dan pengelolaan barang/jasa pemerintah, melewati beberapa proses yang sarat dengan birokrasi dan dapat membuka celah KKN serta terjadinya inefisiensi.

Sarasehan yang diselenggarakan Lemhannas RI merupakan salah satu upaya pemantapan Opini WTP, mengingat pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu isu penting saat ini, sebagai perwujudan prinsip *good governance* di lingkungan Lemhannas RI.

Secara teknis diharapkan proses pengadaan barang/jasa di Lemhannas RI memenuhi prinsip-prinsip dalam Keppres 80/2003 yang terkait dalam *good governance* serta dapat mengelola dan menatausahakan barang milik Negara (BMN) secara benar dan baik. Disamping itu tertib administrasi yang berbentuk laporan akuntabilitas dan penatausahaan BMN di setiap pengguna (satker) akan sangat membantu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara komprehensif dan strategis. Otomatis hal itu akan membentuk budaya organisasi yang akuntabel dan membentuk *Servant Service* pada publik, yang pada gilirannya terwujud optimalisasi sesuai sasaran penerapan PP Nomor 6 tahun 2006. WTP yang sudah dua kali diperoleh Lemhannas RI (2007-2008) harus tetap dipertahankan.



Laksda TNI M. Syamsi R.T, SE, memimpin diskusi Sistem Pengadaan Barang dan Jasa dalam acara Sarasehan di Gd. Dwiwarna Purwa tanggal 23 Juni 2009.

PENGHARGAAN PEMERINTAH RI ATAS PREDIKAT WTP KEPADA LEMHANNAS RI



Gubernur Lemhannas RI (ketiga dari kanan) di antara Para Kepala Departemen dan Lembaga yang mendapatkan Penghargaan Opini WTP dari Pemerintah RI pada acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Di era demokrasi saat ini menurut Sri Mulyani (Menku) dalam sambutan Rakernas tanggal 11 Agustus 2009, bahwa rakyat Indonesia terus-menerus menyuarakan kebutuhan akan adanya tata kelola pemerintahan yang baik. **Rakyat secara kritis menuntut agar pencapaian hasil pembangunan, pengelolaan keuangan Negara, dan segala hal yang berhubungan dengan pelayanan publik dilakukan secara transparan dan akuntabel.** Selaku aparat negara dan pemerintah, kita harus mampu menjawab kebutuhan rakyat.

Kita harus menyadari bahwa **kegagalan memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban dapat menimbulkan implikasi yang luas.** Jika masyarakat menilai pemerintah tidak akuntabel, masyarakat dapat menuntut pergantian pemerintah, penggantian pejabat, perbaikan sistem dan sebagainya. Rendahnya tingkat akuntabilitas juga berpotensi meningkatkan resiko berinvestasi dan mengurangi kemampuan Negara untuk berkompetisi serta melakukan efisiensi. Dalam pengelolaan keuangan Negara, harus selalu diterapkan prinsip keadilan (*equity*) dan pemerataan (*equality*).

Tantangan-tantangan lain yang harus dihadapi dalam pengelolaan keuangan Negara adalah: Penerapan anggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*), Pelaporan Keuangan dan Kinerja, dan Penerapan *Reward and Punishment System*.

Dalam kesempatan acara ini Lemhannas RI mendapatkan penghargaan opini WTP untuk kedua kali secara berturut-turut. Opini WTP merupakan pernyataan profesional Pemeriksa (BPK-RI) mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:

- 1) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah.
- 2) Kecukupan pengungkapan
- 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan,
- 4) Efektifitas sistem pengendalian intern.

Pemerintah RI memberikan penghargaan tersebut kepada Lemhannas RI atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2008 dengan capaian standar tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah.

PELAKSANAAN SSDN DAN SSLN PPSA XVI TAHUN 2009

Sebagai bagian dari Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XVI para peserta wajib melaksanakan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) dan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) yang dilaksanakan pada periode Blok II (Bin Tannas/ Bin Gatra) dan pada Blok III (B S. Lingkungan Strategis Kontemporer). Untuk SSDN dilaksanakan di provinsi Jambi, Jabar, Kaltim, dan Papua Barat dengan judul kegiatan "Good Governance di provinsi guna keberhasilan pembangunan di daerah dalam mendukung pembangunan nasional". Sedangkan untuk SSLN dilaksanakan di negara Rusia, Austria, Belanda, dan Maroko dengan judul kegiatan "Membangun hubungan antar negara guna mengoptimalkan Good Governance dalam rangka pembangunan nasional".

Kegiatan SSDN dan SSLN, merupakan metoda pendidikan yang dikembangkan Lemhannas RI guna memperoleh informasi,

data dan fakta melalui berbagai pertemuan/tatap muka dan diskusi secara langsung dengan para pejabat, akademisi perguruan tinggi negeri/swasta serta para tokoh masyarakat, adat, agama dan tokoh pemuda tentang *good governance* dan pelaksanaan pembangunan nasional di daerah ditinjau dari aspek kesejahteraan dan keamanan, serta berbagai peluang dan kendala yang dihadapi. Selain itu juga untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan sistem demokrasi, pelestarian lingkungan hidup, pelaksanaan otonomi daerah/sistem pemerintahan ditinjau dari kerangka berfikir strategis, komprehensif, holistik dan integral.

Sasaran SSDN dan SSLN adalah :

- a. Memperoleh gambaran potensi, program dan pelaksanaan pembangunan wilayah dalam rangka pembangunan nasional serta permasalahan yang dihadapi.
- b. Memperoleh masukan tentang



Rombongan SSLN Belanda Peserta PPSA XVI foto bersama menggunakan pakaian tradisional Nelayan Belanda.

manfaat dari obyek-obyek yang ditinjau dari aspek kesejahteraan dan Hankam, meliputi : Latar belakang, Prospek di masa mendatang, Motivasi/Aspirasi masyarakat, Realisasi pelaksanaan pembangunan, dampak yang timbul, dan hal-hal penting lainnya.

- c. Aplikasi penerapan cara berpikir komprehensif integral dalam menghadapi permasalahan pembangunan nasional/internasional antara lain dalam menjabarkan kebijakan strategis nasional kedalam pelaksanaan operasional di lapangan.
- d. Untuk mendapatkan data-data kajian kondisi Ketahanan Nasional di daerah yang meliputi ; Kondisi Geografi, Demografi, dan SKA, serta aspek Ipoleksosbudhankam, tingkat kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan daerah serta bagaimana pengimplementasiannya.
- e. Mendapatkan data-data yang dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk Seminar Nasional.



Rombongan SSDN Peserta PPSA XVI foto bersama Gubernur Kaltim (baris depan nomor 9 dari kanan) sesaat setelah acara silaturahmi.

KKL BEM FH UNDIP SEMARANG TANGGAL 23 JULI 2009



Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan BEM ke Lemhannas RI pada tanggal 23 Juli 2009, diikuti oleh 50 orang Mahasiswa,

Ketua BEM Aldino Wisnu mengatakan tujuan kunjungan adalah untuk menjalin silaturahmi dan kerjasama diberbagai bidang dengan instansi pemerintah dan swasta. Dalam hal ini mahasiswa dapat secara langsung berinteraksi dan bertukar pikiran dengan para pejabat sehingga dapat mengetahui dan memahami fungsi dan visi Lemhannas RI. Mahasiswa sebagai salah satu pilar kekuatan bangsa Indonesia, pada saat ini menjadi salah satu elemen yang tak terpisahkan dari kemajuan bangsa Indonesia. Mahasiswa diharapkan mampu menjadi generasi penerus bangsa yang konsisten dan kompeten dibidangnya serta mempunyai etos kerja yang tinggi guna membangun peradaban Indonesia yang lebih maju dan harmonis.

KKL IKIP VETERAN SEMARANG

Tanggal 28 Juli, 123 Mahasiswa IKIP Veteran Semarang dengan 8 dosen pembimbing melakukan KKL ke Lemhannas RI. Menurut pimpinan rombongan Drs. Srihadi, kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan karena Lemhannas RI merupakan Laboratorium Pendidikan yang sangat penting untuk dikunjungi. Kunjungan mereka untuk memahami masalah yang berkembang dalam kehidupan Bangsa dan Negara yang bersifat multidimensional sekaligus ingin mendapatkan alternatif solusi pemikiran/kajian dari Lemhannas RI. Sebagai *transfer of value* kepada para mahasiswa, Lemhannas RI memberikan ceramah pembekalan interaktif menyangkut Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan Indonesia.



Pengenalan Lembaga oleh Sekretris Utama Lemhannas RI - Dr. Ardi Partadinata, MH, M.Si. kepada Para Mahasiswa IKIP Veteran Semarang di Gd. Panca Gatra Lt. III Barat Lemhannas RI.

Pengarah : DR. Ardi Partadinata, MH, M.Si.

Penanggung Jawab : Brigjen TNI Kusworo, **Redaktur :** Kolonel Ckm (K) Dr. Zawiah Ramlie, MH, M.Sc

Penyunting/Editor : Djoko Saksono, Kolonel Caj. M. Sochib SM., Letkol Adm. Drs. M. Syahril, MM, Mayor Inf. Risnal SH. MA. **Redaktur Pelaksana :** Linda Purnamasari., Mayor Caj (K) Rita Ratnayu

Desain Grafis & Fotografer : Arief Musadayan, Arianto **Sekretariat :** Syafrizal, Gatot

Alamat Redaksi : Biro Humas Settama Lemhannas RI, Jl. Merdeka Selatan No. 10 Jak-Pus (10110)
Telp. (021) 3832108, 3832109, Fax. (021) 3451926